



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI, Menteri Keuangan RI, Panglima TNI dan menghadirkan KASAL
Hari, Tanggal	: Kamis, 27 Januari 2022
Pukul	: 10.12 WIB - 11.07 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	: Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: Persetujuan penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 dan Kapal KRI Teluk Penyus-513 pada Kementerian Pertahanan
Hadir	: PIMPINAN: 1. Meutya Viada Hafid (F-PG) 2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) 3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra) 4. H. Anton Sukartono Suratno, M.Si. (F-PD) 5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri
16. Itet Tridjajati Sumarijanto

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

17. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
18. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
19. I. Lodewijk F. Paulus
20. Nurul Arifin, M.Si.
21. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
22. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
23. H. Alex Noerdin

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

24. Sugiono
25. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
26. Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc.
27. Rachel Maryam Sayidina
28. Fadhlullah, S.E.
29. R. Imron Amin, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

30. Prananda Surya Paloh
31. Muhammad Farhan
32. Kresna Dewanata Phrosakh
33. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
34. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

35. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
36. Dr. (H.C.) H. A Muhaimin Iskandar, M.Si.
37. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
38. A. Helmy Faishal Zaini

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

39. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
40. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
41. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
42. Teuku Riefky Harsya

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)

43. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
44. H. Sukamta, Ph. D.
45. H. Ahmad Syaikhu
46. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

47. Ir. Alimin Abdullah
48. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
49. Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc.
50. Slamet Ariyadi, S.Psi.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

51. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

52. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

Anggota yang Izin : 1. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.

Undangan : 1. Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto.
2. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.
3. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.
Beserta Jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Om swastiastu
Salam kebajikan.

Pertama-tama Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran.

Selamat datang kepada yang terhormat Saudari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati beserta seluruh jajaran. Terima kasih Ibu sudah mampir di Komisi I juga memenuhi undangan Komisi I.

Kemudian saudara Panglima TNI atau yang mewakili.

Bapak, Ibu Pimpinan maupun Anggota Komisi I yang terhormat.

Pukul 09.00 tadi kami menerima *WhatsApp* dari Pak Panglima bahwa berkenaan dengan kejadian di Papua pagi tadi beliau harus berangkat sehingga beliau mewakili kehadirannya di sesi rapat ini.

Kemudian yang terhormat Saudara Kasal Laksamana TNI Yudo Margono.

Yang terhormat Bapak, Ibu Pimpinan maupun Anggota Komisi I DPR RI.

Hari ini kita memulai Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan serta TNI dan dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 3 November bahwa pelaksanaan rapat-rapat di lingkungan komplek DPR RI sudah dapat dilakukan dengan jumlah kehadiran maksimal 75%.

Kami menerima informasi hadir fisik 17 anggota dengan 8 fraksi sudah hadir artinya kuorum fraksi telah terpenuhi dan rapat dapat kita buka Bapak Ibu saya mohon izin dulu ini persetujuan surat presiden sifatnya bisa kita lakukan terbuka? Terbuka ya rapat kita buka dengan sifat terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.12 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)

Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan.

Ibu Menteri Keuangan.

Komisi I telah mendapat penugasan dari Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tertanggal 13 Januari 2002 untuk membahas Surat Presiden Nomor R52/Presiden/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 terkait dengan persetujuan penjualan barang milik negara berupa eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan.

Menindak lanjuti hal tersebut Rapat Intern Komisi I tertanggal 19 Januari 2022 memutuskan untuk segera membahas persetujuan terhadap penjualan barang milik negara berupa eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan. Untuk itu pada hari ini kita melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Laut untuk mendapatkan penjelasan terkait penjualan barang milik negara berupa eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan.

Untuk itu kami segera persilahkan kepada yang terhormat Saudari Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan atas surat presiden yang telah diterima DPR RI terkait dengan hal tersebut. Kami persilahkan Ibu Menkeu.

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.SC., PH.D.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Pimpinan Komisi I dan seluruh Anggota Komisi I.

Selamat pagi Bapak Prabowo Subianto Menteri Pertahanan dan KASAL Pak Yudo dengan seluruh Hadirin.

Hari ini kami mohon maaf nanti karena harus meninggalkan acara ini karena harus mengikuti pertemuan dengan Bapak Presiden kami akan menyampaikan mengenai kronologis dan bagaimana proses untuk penjualan barang milik negara yaitu berupa kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan.

Seperti diketahui bahwa KRI Teluk Mandar 514 itu diperoleh dengan nilai perolehan atau dibeli atau diadakan waktu itu dengan nilai perolehan sebesar 121.897.258.397,- pada tahun 1979, dan kapal ini berada di lokasi dermaga Koarmada 2 Surabaya. Sedangkan KRI Teluk Penyu 513 nilai perolehan pada saat dibeli tahun 1979 juga adalah sebesar 121.034.333.397,- juga berada di Dermaga Koarmada 2 Surabaya. Penjualan BMN atau barang milik negara ini karena kondisi kapal sudah rusak berat tidak efisien untuk diperbaiki serta apabila dihapuskan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi dari TNI Angkatan Laut.

Kronologis dari usulan untuk penjualan adalah pertama pada tanggal 20 Februari 2020 Kementerian Pertahanan mengajukan usulan penjualan eks KRI Teluk Mandar dan eks KRI Teluk Penyu yang termuat di dalam Surat B/441/09/23/01DJKUA dan B/1798/09/23/01 DJKUA tanggal 8 Oktober 2019. Jadi ada dua surat yang satu untuk KRI Teluk Penyu dan yang satu adalah untuk KRI Teluk Mandar. Namun pada tanggal 10 Juli Kementerian Pertahanan menghentikan proses penjualan ini dan kemudian pada tanggal 10 Juli 2020 Kementerian Pertahanan menghentikan proses penjualan. Pada tanggal 28 April 2021 Kementerian Pertahanan melanjutkan usulan proses penjualan kembali dan ini dimuat dalam dua surat yaitu untuk KRI TLP 513 adalah dengan surat B81009/14/318 DJKUA.

Alih status dari eks KRI Teluk Penyu disampaikan oleh Kemenhan dengan menyampaikan usulan agar status eks KRI Teluk Penyu dijadikan terumbu karang di perairan Nusa Dua yaitu melalui surat tanggal 19 Mei 2021 dan rencana eks KRI untuk terumbu karang tidak dapat dilanjutkan dan proses penjualan kemudian dilanjutkan kembali. Oleh karena itu proses izin untuk penjualan kepada Menteri Keuangan dan Presiden disampaikan oleh Kementerian Pertahanan. Kemudian ini pada tanggal 26 September 2021

Bapak Presiden pada tanggal 29 Oktober 2021 menyampaikan permohonan izin penjualan kepada DPR melalui Surat 52/PRES/10/2021. Kenapa kita harus melalui proses kepada kementerian dari Kementerian Keuangan, Bapak Presiden, dan kemudian kepada DPR? Sesuai dengan aturan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 2004 dan Pasal 55 ayat (1) dari PP 27 Tahun 2014 JO PP28 2020 "*Pemindahtanganan barang milik negara untuk selain tanah atau bangunan yang nilainya lebih dari 100.000.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR dan penilaian BMN dilakukan dalam hal penyusunan neraca pemerintah pusat dan daerah pemanfaatan atau pemindahtanganan*

kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah”

Nah untuk itu maka proses penghapusan melalui penghapusan BMN tadi 2 KRI ini dengan melalui pemindahtanganan atau penjualan dengan nilai 100.000.000.000,- adalah mulai dengan usulan dengan Kementerian yang memiliki barang tersebut kepada Kementerian Keuangan yang kemudian melakukan analisa teknis, yuridis, dan ekonomis disampaikan kepada Bapak Presiden kemudian Bapak Presiden menyampaikan kepada DPR untuk izin penjualan dari barang milik negara yang nilainya tadi di atas 100.000.000.000,-. Apabila DPR menyampaikan izin penjualan, maka Kementerian Keuangan akan melakukan penilaian barang milik negara tersebut dan melakukan persetujuan proses penjualan lebih lanjut untuk dieksekusi oleh Kementerian Pertahanan.

Usulan lelang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kementerian Keuangan hasil lelang akan masuk ke kas negara dan keputusan penghapusan barang milik negara dari laporan Keuangan dari Kementerian Pertahanan akan bisa dilaksanakan.

Demikian Pimpinan, dari kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan dua kapal yaitu KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Kami mohon maaf untuk bisa pamit sesudah ini dan nanti diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara yaitu Pak Rio Silaban terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik, terima kasih Saudari Menteri Keuangan atas penjelasannya berikutnya kami akan lanjutkan nanti tentu pedalaman dengan Saudara Menhan, Pak KASAL dan juga nanti perwakilan dari Kementerian Keuangan Dirjen Kekayaan Negara yang tetap akan mengikuti rapat ini hingga selesai.

Dengan demikian kami terima kasih penjelasannya Saudari Menteri Keuangan silakan kalau memang sudah ditunggu Presiden kita izinkan untuk meninggalkan ruangan kita skors untuk 1 menit.

(RAPAT: DISKORS 10.22)

Baik, sepertinya tidak usah tunggu 1 menit ya skors langsung kita cabut.

(SKORS DICABUT 10.23)

Dan berikutnya penjelasan tambahan terkait penjualan barang milik negara berupa eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada kementerian yang mengusulkan yaitu Kementerian Pertahanan. Kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto.

MENTERI PERTAHANAN RI (LETNAN JENDERAL TNI (PURN.) H. PRABOWO SUBIANTO):

Saya minta izin buka.

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom.
Om Swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua Komisi I DPR RI Ibu Meutya Viada Hafid
Pimpinan Komisi I DPR RI yang hadir.
Para Anggota Komisi I yang saya hormati.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Keuangan RI, Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut untuk membahas persetujuan penjualan barang milik negara berupa Kapal eks KRI Teluk Penyu 513 dan KRI Teluk Mandar 514 dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam suasana penuh kebersamaan.

Pimpinan rapat dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Pada kesempatan ini akan kami sampaikan kronologis terkait permohonan penghapusan dengan mekanisme pemindahtanganan lelang dari KRI Teluk Penyu 513 buatan Korea tahun 1980 dan KRI Teluk Mandar 514 buatan Korea tahun 1980. Berdasarkan Surat keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut tentang rencana penghapusan 15-unit KRI pada renstra 2 MEF 2015-2019.

Menindaklanjuti rencana penghapusan tersebut TNI angkatan laut telah membentuk tim penelitian dan pencelaan dengan merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Secara teknis bahwa kondisi material tidak layak digunakan akibat bangunan kapal dan perpipaan banyak yang keropos;
- b. Permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi komunikasi, dan instrumen di anjungan sudah tidak bisa digunakan lagi;
- c. Kondisi platform dan Sewaco tidak layak dipergunakan serta;
- d. Tidak efisien untuk diperbaiki atau di-*replacement*;
- e. Dengan melihat kondisi tersebut maka didapatkan nilai taksiran limit jual atau lelang dari KRI Teluk Penyu 513 sebesar 4.91Miliar dengan nilai perolehan sebesar 121,03Miliar dan KRI Teluk Mandar 514 nilai limit sebesar 695.000.000,- dengan nilai perolehan 121,89 Miliar.

Atas dasar rekomendasi hasil dari tim penelitian dan pencelaan KASAL mengajukan kepada Panglima TNI tentang permohonan pemindahtanganan dengan penjualan secara lelang. Selanjutnya Panglima TNI menindaklanjuti permohonan tersebut kepada Menteri Pertahanan RI setelah dilakukan *assessment* dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, Kementerian Pertahanan RI membuat surat kepada Kementerian Keuangan RI tentang permohonan pemindahtanganan dengan penjualan secara lelang KRI Teluk Penyu 513 dan KRI Teluk Mandar 514, Inventaris TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada 2

Dengan menggaris bawahi bahwa kondisi KRI Teluk Penyu 513 dan KRI Teluk Mandar 514 rusak berat dan penghapusan ini tidak akan mengganggu tugas pokok dan fungsi TNI Angkatan Laut. Sesuai dengan Permenhan Nomor 18 Tahun 2017 dengan tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN selain tanah dan atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI dan Permenhan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN Selain Tanah dan atau Bangunan di Lingkungan Kemhan dan TNI.

Disampaikan bahwa pemindahtanganan BMN selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,- oleh Kementerian Keuangan RI, nilai perolehan lebih dari 10.000.000.000,- sampai dengan 100.000.000.000,- persetujuan oleh Presiden RI, dan nilai perolehan lebih dari 100.000.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Hadirin peserta rapat.

Dan Para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Dengan penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan semoga niat baik kita mendapatkan Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa di dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada nusa dan bangsa yang sangat kita cintai bersama.

Untuk itu selanjutnya kami mohon persetujuan Komisi DPR RI. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Shalom

Om shanti shanti shanti om

Nam buddhaya

Selesai, terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Terima kasih penjelasan yang komprehensif dari Saudara Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto sekaligus kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Utut Adianto sudah bisa melengkapi meja pimpinan. Jadi semakin ramai untuk memberi persetujuan.

Berikutnya juga kami mohon juga penjelasan yang lebih detail lagi dari Kepala Staf Angkatan Laut terutama tadi terkait pernyataan Bapak Menhan bahwa hal ini tidak akan mengganggu tugas pokok TNI Angkatan Laut. Meskipun tadi sudah di jelaskan memang sudah tidak dapat dipakai tapi kami juga ingin memastikan bahwa dengan persetujuan yang kita akan berikan tidak akan mengganggu tugas pokok dari TNI Angkatan Laut. Silakan Pak KASAL.

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT (LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.):

Izin kami membuka masker Bu.

Terima kasih yang terhormat Ketua Komisi I.

Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi I beserta Anggota Komisi I yang kami muliakan.

Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan.

Yang saya hormati Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu.

Yang saya hormati juga para Perwira pendamping.

Pada kesempatan ini kami akan menambahkan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Kemenkeu dan Bapak Menhan tentang prosedur penghapusan dan tentunya kami menambahkan bahwa dari dua kapal ini memang benar-benar bahwa kapal ini sudah tidak layak dan sudah kita istirahatkan sejak 4 tahun yang lalu, sehingga menunggu hasil administrasi kapal-kapal tersebut sehingga baru keluar persetujuannya.

Dan juga kami laporkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 juga telah muncul keputusan presiden ada satu lagi kapal yang sejenis ini sebenarnya kami izin juga untuk bisa dimasukkan dalam rapat ini sehingga dari 513, 514 ada satu lagi KRI Teluk Sampit 515 jadi juga tinggal menunggu persetujuan DPR RI. Jadi tidak 2 kapal namun 3 kapal kami laporkan bahwa kondisi kapal KRI Teluk Mandar dan yang saat ini, itu gambarnya itu tolong ditampilkan gambarnya, dari Teluk Penyau dan dari Teluk Mandar. Slide kondisi saat ini dari Teluk Mandar dan Teluk, slide 7.

Mohon izin ini kami laporkan tentang kondisi saat ini baik geladak kemudian anjungan juga dari badan kapal, kondisinya memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dioperasikan. Dan saat ini pada kapal yang bersamaan juga telah tenggelam karena memang sudah tidak ada perawatan. Jadi begitu dinyatakan kapal ini sudah dihapus atau diajukan penghapusan kapan ini sudah tidak ada perawatan lagi dan personilnya juga akan ditarik, sehingga kapalnya tidak ada personil yang mengawaki sehingga apabila ini prosesnya lama. Sehingga kapal tersebut akan tenggelam dan ini sudah ada 3 kapal dari 22 kapal yang kita ajukan penghapusan, ada 3 kapal yang sudah tenggelam.

Lanjut di slide 8. Kemudian kami laporkan bahwa di TNI AL sekarang ini ada 22 KRI yang diajukan untuk penghapusan, selain dari 2 kapal yang sekarang ini diajukan ke DPR RI ini kondisi kapal yang tenggelam. 1 di Surabaya KRI Teluk Ratai 509. Kemudian KRI Nusa Utara ini ada di Bitung Manado. Kemudian KRI Pati Unus ini ada di Belawan kondisinya seperti ini Pak. Ini sangat mengganggu operasional dari dermaga kita apabila dengan Dermaga yang terbatas digunakan untuk kapal-kapal yang siap operasional sehingga terganggu dengan adanya kapal-kapal ini. Sehingga kami sangat bermohon untuk kapal-kapal yang sudah diajukan ini dapat segera diputuskan.

Kemudian untuk proses lelang kami laporkan bahwasanya tadi dari Kemenkeu, kemudian TNI AL ini hanya sebagai Satgas pembantu DJKN. Jadi yang melelang adalah DJKN bukan TNI AL. Jadi kami TNI AL hanya membantu saja Satgasnya sehingga nanti dari hasil pelelangan tersebut akan masuk ke kas negara sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Kemenkeu.

Kemudian untuk proses penghapusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa proses penghapusan ini sudah melalui tim dari satker terbawah sampai Mabes AL, Mabes AL kita ajukan sesuai prosedur sampai ke Mabes TNI, Kemenhan kemudian Kemenkeu sampai ke DPR RI tadi, Presiden kemudian DPR RI.

Jadi kapal-kapal yang sudah dinyatakan akan penghapusan ini betul-betul sudah melalui tim pengkaji yang memang benar-benar kapal ini sudah tidak layak lagi untuk dilaksanakan atau dioperasionalkan ataupun apabila di report *replacement* akan membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar sehingga kapal ini dilaksanakan penghapusan, dan tentunya di dalam penghapusan juga ada perencanaan untuk pembangunan. Jadi dari kapal-kapal jenis LST yang saat ini dihapus ini, sudah ada penggantinya LST yang sudah dibangun sejak 5 tahun yang lalu sehingga jumlahnya 9. Ini sudah ada 9 kapal yang memang ada 3 yang belum jadi di PT. DRU Lampung yang nantinya sebagai pengganti kapal-kapal ini.

Demikian yang dapat kami tambahkan dalam laporan ini terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Terima kasih Saudara Kasal.

Terkait tadi tambahan KRI untuk dibahas jadi kami rapat ini berpegang kepada Surat Presiden. Jadi yang akan dibahas dalam rapat ini hanya eks KRI Teluk Mandar 514 dan kapal KRI Teluk Penyu 513. Terkait jikalau diperlukan hal-hal lain dengan KRI lainnya maka nanti memerlukan surat tambahan dari Pemerintah dalam hal ini langsung surat presiden.

Demikian Bapak, Ibu sekalian penjelasan dari Saudari Menteri Keuangan, Bapak Saudara Menhan dan juga Kepala Staf Angkatan Laut. Berikutnya kami persilahkan kepada fraksi-fraksi melalui anggota-anggotanya untuk memberikan pendalaman mudah-mudahan tidak lalu panjang karena berikutnya kita juga ada agenda tambahan bersama Menteri Pertahanan yang pertama Pak Alimin bersiap-siap Pak Tubagus Hasanuddin.

F-PAN (IR. ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih Ketua.

Rekan-rekan Komisi I yang saya hormati.
Pak Menteri dan Bapak Kasal yang saya hormati.

Pada prinsipnya kami bisa setuju cuma ada pertanyaan barangkali karena dari riwayat kapal ini sama-sama dibeli tahun '79. Teluk Penyu dan apa Teluk Mandar ini hampir sama harganya, pembelian tahunnya sama harganya hampir sama-sama 120.000.000.000,-. Tetapi ketika dia kita jual kembali, yang harga yang lebih murah Teluk Penyu itu bisa mendapatkan 4.9M, sedangkan yang lebih mahal Teluk Mandar hanya 655.000.000,-. ini kira-kira apa masalah apa barangnya ada yang hilang atau memang pemeliharaannya yang berbeda sehingga dari yang lebih murah bisa mendapat hampir 5.000.000.000,- ini laporannya Pak. Sedangkan yang Mandar itu yang lebih mahal hanya dapat 655.000.000,- kalau bisa dapat penjelasannya Pak Kasal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Terima kasih Bapak Alimin Abdullah dari Fraksi PAN berikutnya Bapak Tubagus Hasanuddin dari Fraksi PDIP Perjuangan.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Ibu ketua yang saya hormati beserta para Pimpinan Komisi I Menteri Pertahanan beserta jajaran.
Kemudian di sini hadir Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian yang mewakili Menteri Keuangan, Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami memperhatikan yang pertama undang-undang terkait kemudian nilai guna dari kedua KRI dimaksud dalam hal ini adalah KRI itu dan KRI Teluk Mandar, sementara

KRI yang lain mungkin kita nanti ikuti prosedur yang berlaku saja untuk Bapak KASAL ya, kemudian beban pemeliharaan yang tidak efektif dan efisien lagi maka dengan seizin Allah Fraksi PDIP Perjuangan setuju KRI Teluk Penyau dan KRI Teluk Mandar dijual sesuai aturan yang berlaku. Jadi mungkin nanti tadi melalui apa dijualnya lelang dan lain sebagainya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Pak Imron mau mewakili dari Fraksi Gerindra, dari Gerindra silakan Pak soalnya belum ada yang angkat tangan untuk mau bicara. Jadi silakan Pak Sugiono

F-GERINDRA (SUGIONO):

Langsung persetujuan apa bagaimana?

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Kalau yang terhormat Pak Sugi tidak ada pendalaman langsung setuju juga boleh.

F-GERINDRA (SUGIONO):

Baik.

Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan.

Terima kasih kepada Pimpinan mohon izin Pak Ketua Umum, ya kan memang. Baik berdasarkan penjelasan tadi yang sampaikan oleh Saudari Menteri Keuangan kemudian Bapak Menteri Pertahanan dan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, kami dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyetujui usulan penjualan barang milik negara berupa KRI Teluk Mandar dan KRI Teluk Penyau pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ya singkat, padat, jelas Pak Sugiono. Kemudian berikutnya dari Fraksi Golkar Pak Dave angkat tangan silakan Pak Dave.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Baik terima kasih Pimpinan yang mulia.

Yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan dengan dari Kementerian Keuangan yang mendahului Pak Kepala Staf Angkatan Laut.

Tadi penjelasannya sudah sangat tepat dan juga sudah sangat jelas, kami harap proses ini segera dijalankan agar demi kemajuan TNI Angkatan Laut juga dan juga bisa

mempercepat proses reformasi ataupun juga perbaikan dari Alutsista TNI Angkatan Laut bahwa menyatakan setuju atas usulan tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Terima kasih Saudara yang terhormat Dave Laksono dari Fraksi Partai Golkar berikutnya saya lihat ada Pak Taufiq Abdullah dari Fraksi PKB silakan Pak Taufiq.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan para Anggota.

Pak Menhan.

Pak KASAL.

Pak Dirjen Kementerian Keuangan.

Prinsipnya saya kira kita tidak perlu panjang kata dan memang tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena itu maka secara resmi Fraksi Partai kebangkitan bangsa menyetujui apa yang menjadi usulan Pemerintah.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, berikutnya saya lihat ada Pak Farhan dari Fraksi Nasdem Pak Farhan.

F-NASDEM (MUHAMMAD FARHAN):

Terima kasih Pimpinan.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Saya atas nama Fraksi Partai Nasdem menyatakan sangat setuju atas rencana ini. Terima kasih.

Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik. Terima kasih yang terhormat Saudara Farhan.

PPP hadir? tadi ada Pak Tamliha. Beliau tadi agak kurang sehat, jadi mungkin, ada yang mewakili dari PPP? Baik kalau begitu tadi disampaikan dari Demokrat Pak Anton langsung yang akan menyampaikan sikapnya. Silakan yang terhormat Pak Anton.

F-PD/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Dari Fraksi Partai Demokrat kita menerima dengan catatan, tolong disiapkan penggantinya Pak. Jadi 2 kapal ini boleh saja mau dilelang tapi dihapuskan. Tapi kalau nggak ada gantinya bagaimana Pak kita menghadapi di Laut China Selatan itu benar-benar bahaya Pak. Jangan sampai kita kehilangan 2 kapal dan tergap-gagap nanti kalau kejadian perang terjadi. Jadi Fraksi Partai Demokrat, kita menyetujui dengan catatan minta penggantinya segera.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik, terima kasih yang terhormat Pak Anton mewakili Fraksi Partai Demokrat dengan catatan. Tapi catatannya bagus bahwa ini dalam rangka agar angkatan laut tetap dapat melakukan tugas pokok dan fungsi-fungsinya secara maksimal.

Berikutnya kami mohon dari Fraksi PKS juga saya lihat Pak Abdul Kharis, satu-satunya yang hadir tadi Ketua Fraksi sudah berbicara, jadi silakan mewakili fraksi Pak Abdul Kharis.

F-PKS/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati.
Pak Menhan, KASAL dan Menteri Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara yang saya hormati.

Melihat apa yang disampaikan oleh KASAL sebagai pengguna, kapal tersebut dinyatakan sudah tidak bisa dipakai, dikuatkan oleh Menteri Pertahanan juga sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki ataupun juga ditingkatkan kemampuannya, dan kemudian Dirjen Kekayaan Negara dalam hal ini setuju untuk penghapusan. Tentunya pandangan-pandangan dan perhitungan secara pengelolaan kekayaan negara sudah diperhitungkan dengan baik. Apalagi Ibu Menteri Keuangan tadi menyampaikan juga ada juga teman satu kampung Pak tadi yang sama Menteri Keuangan. Jadi saya yakin sekali sudah dihitung dengan baik Pak. Oleh karenanya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi PKS menyetujui tanpa memberikan catatan apa-apa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Ini bedanya yang pakai *Bismillahirrahmanirrahim* baru PKS dari tadi, yang lain dalam hati, berikutnya saya rasa sudah hampir semuanya. Ada Bapak, Ibu Anggota yang terhormat yang ingin mungkin menambahkan sebelum kita masuk ke kesimpulan? Silakan yang terhormat dari meja Pimpinan, Bapak Utut Adianto yang terhormat

F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (DRS. UTUT ADIANTO):

Terima kasih Ibu Ketua.

Pimpinan Para Anggota Komisi I yang sangat dihormati.

Pertama kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ananda dari Mbak Nurul Arifin, semoga dia bahagia di sana dan saya yakin dia menjalankan 2 Timotius 4 ayat (7).

Pak Menteri, sayangnya Ibu Menteri Keuangan sudah pulang. Kalau persetujuan semua sudah tadi di sebelah kanan Bapak *World Best Finance Minister for Three Years in a room*. Problem utama dari *World Best Finance Minister* adalah yang diwakili oleh Saudara Silaban ini bahwa TNI itu tidak perlu kuat, konsepnya bahwa perang konvensional tidak ada. Nah ini yang harusnya diluruskan tadi pada saat pertemuan.

Kalau persetujuan kapal ini pasti kita setuju. Mohon izin nanti yang harus diperiksa adalah mekanismenya. Jangan sampai kita yang ikut menyetujui ada kekeliruan di lapangan nanti dipanggil oleh kawan-kawan kita yang di Kuningan ini harus sesuai.

Tetapi langkah hari ini bertemu ini kan potret nyata, Silaban lapor ke Sri Mulyani Bapak ini kayak tek kotak kotak anak ayam turun sepuluh mati satu tinggal sembilan. Ini udah mati dua, itu Pak KASAL bilang masih banyak yang mati, tenggelam terus harusnya inikan nyata-nyata angkatan laut kita lemah.

Kata Belanda *wat we doen* apa *what a noon we do* karena saya kalau ngomong Tiongkok diprotes Pak Menhan, Pak Utut ngomong benar nggak itu artinya apa disangkanya saya bohongin beliau. Tetapi sekali lagi ini fakta bahwa beliau dan Angkatan TNI kita harus diperkuat. Bu Sri Mulyani *World Best Finance Minister for Three years in a room* ini fakta. Tidak ada negara yang kuat yang TNI lemah. Ini baru mati 2, besok ini nggak usah di persetujuan tenggelam sendiri. Pesan morilnya harus ada satu visi negara hebat negara kuat TNI harus kua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Terima kasih sekali Bapak Saudara Utut Adiyanto yang menyuarakan semangat Komisi I. Pak Dirjen nanti mungkin disampaikan, tadi Ibu Menkeu terburu-buru sekali sih karena dipanggil Pak Presiden. Tapi kurang lebih keinginan kami bagaimana pertahanan karena kita bolak-balik Rapat Kerja dengan Pak Menhan ya ujung-ujungnya permasalahannya adalah bagaimana anggaran kita belum mencukupi untuk membangun sebuah kekuatan pertahanan yang kemudian bisa memiliki efek getar membuat Indonesia lebih bermartabat di mata terutama negara-negara di sekelilingnya. Jadi tolong nanti itu disampaikan.

Baik, terima kasih sekali Pak Utut ada lagi Bapak, Ibu sebelum kita ke kesimpulan mudah-mudahan tinggal Pak Sturman yang terhormat. Tentu ini karena Angkatan Laut meskipun tidak sama persis tapi mewakili juga dan juga nanti Pak Yan untuk menambahkan silakan Pak Sturman.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Bapak Menteri
Bapak KASAL dan yang mewakili Pak Menteri Pak Silaban.

Saya hanya ingin menggaris bawahi Bapak KASAL Bapak Menhan. Kalau tadi Bapak KASAL mengatakan KRI cukup, tergantung menurut saya mungkin perlu dicek lagi Bapak KASAL ditambah 10 lagi pun nggak cukup Pak, nggak usah dihapuskan itu saya kira nggak cukup. Jadi apa yang dikatakan Pak Utut tadi memang Menteri Keuangan harus berpikir dengan jernih Pak. Karena ini sudah nunggu lagi ini yang mungkin lebih dari 20 kapal KRI lagi yang harus dihapuskan.

Saya nggak tahu persis berapa yang sudah ada yang menunggu dihapus. Tapi ada yang tidak bisa digerakkan lagi. Kalau Pak Silaban tahu cek ke Angkatan Laut. Dengan kondisi yang sekarang apakah sudah bisa kita melindungi seluruh wilayah NKRI ini yang 75% adalah laut.

Jadi benar kata Pak Utut tadi, mari kita dengan cerdas melihat ini. Kemarin kita bicara tentang keamanan laut, sekian ratus kapal, ada 572 kapal yang bukan angkatan laut punya. Katakanlah angkatan laut punya 1000, 1700 kapal di seluruh NKRI ini belum cukup untuk mengawasi laut kita yang luas yang 75% adalah laut, yang katanya adalah negara terbesar kepulauan terbesar yang terletak di kepulauan khatulistiwa, zamrud khatulistiwa.

Tapi mungkin ini menurut saya perlu nanti Bapak KASAL cek ke sana lagi, tidak, saya nggak, saya kurang pas tadi kalau dikatakan sama saja, sudah ada tambah lagi, 7 KRI itu belum cukup Pak apalagi yang LST. Saya yakin berapa pun yang dioperasikan, masih belum cukup. Jadi menurut saya makin banyak dibeli atau ditiadakan baik oleh Kemenhan atau siapa pun itu bukan berarti sudah cukup. Sehingga apa yang dikatakan tadi memang perlu ketelitian dan kehati-hatian, agar kita ini bisa terlindungi, bisa seluruh wilayah kita bisa kita amankan.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Terima kasih yang terhormat Bapak Sturman yang berikutnya Pak Yan dan mungkin terakhir tadi Ibu Nurul juga ingin menambahkan *urun rembuk* silakan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Aku pikir cukup Bu, setuju dengan Pak Utut dan Pak Sturman dari Perhatian Menteri Keuangan yang kita butuh Pak.

Makasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik, terima kasih.

Nanti isu-isu lainnya bisa kita bahas di rapat sesi berikutnya.

Ibu Nurul Arifin yang terhormat, hari ini terima kasih sudah hadir Mbak Nurul silakan.

F-PG (NURUL ARIFIN):

Baik Ketua terima kasih.

Yang saya hormati Ketua dan para Pimpinan juga Bapak Menhan.

Terima kasih bunganya Pak, terima kasih banyak.

Saya mendukung sepenuhnya penjualan kapal selam ini, namun juga tadi mendukung pernyataan dari Pak Anton dan Pak Sturman untuk jangan lupa memberikan penggantinya dan kami mendukung penuh untuk penguatan Alutsista yang Bapak rencanakan Pak. Ini demi ketahanan pertahanan wilayah Republik Indonesia.

Saya kira itu yang kami ingin sampaikan terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Terima kasih Ibu Nurul atas *urun rembuknya*, juga silakan tadi saya lupa ada beberapa hal yang perlu direspons atau dijawab dari Bapak, Ibu yang terhormat Anggota Komisi I. Silakan Pak Prabowo kalau ada yang ingin ditambahkan. Kemudian nanti memang lebih banyak kepada Pak KASAL.

MENTERI PERTAHANAN RI (LETNAN JENDERAL TNI (PURN.) H. PRABOWO SUBIANTO):

Baik, terima kasih Pimpinan Komisi I dan Para Anggota.

Pertama terima kasih atas dukungannya, persetujuannya. Tadi ada pertanyaan tentang perbedaan harga. Perbedaan harga antar kedua kapal tersebut itu terjadi karena ada perbedaan indeks harga dari besi, baja. Jadi pada saat ditaksir KRI Teluk Penyu 513 itu harga baja besinya itu 4.500,-/kg. Begitu KRI Teluk Mandar yang dievaluasi, harganya 2.500,-/Kg itu perbedaan intinya itu dilakukan oleh tim lelang. Jadi saya kira itu masalahnya adalah kondisi pada saat taksiran harganya berbeda harga indeks. Kemudian menanggapi.

F-PAN (IR. ALIMIN ABDULLAH):

Bisa minta penjelasan yang ini, mohon maaf Pak Menteri, karena prinsip kami sudah setuju. Tapi ini menjadi sumber pertanyaan yang paling mudah di luar karena tahun pembeliannya sama, barangnya hampir sama, dan ya tahun pembelian sama-sama 79 harga sama-sama 121. Tapi ketika kita mau melepas, barang inikan sama, alat tempur semua sama, yang satu yang harganya lebih murah malah yang penyu itu, yang kita beli 12 ... (ucapan tidak jelas) 34 menjadi 4,9 M. Sedangkan yang lebih mahal tadi menjadi nggak sampai 1 M. Jadikan di luar itu rakyat cepat melihat kalau angka itu seperti itu membandingkan barang yang sama-sama modelnya, tahunnya, dan harganya. Tetapi ketika kita melepas kembali terus bedanya jauh sekali. Jadi rakyat akan bertanya Pak. Jadi persetujuan kita saya kira semua-semua

setuju itu Pak, cuma hal-hal seperti ini seperti kata teman saya tadi Ketua saya ini menjadi bisa lapor ke Kuningan ini Pak.

Jadi sebelum itu saya kira juga sebagai anggota yang menyetujui ... (ucapan tidak jelas) ini paham apakah cukup dengan menyatakan perolehan, materinya itu bisa diterima? Kan ini sama-sama bahannya. Saya nggak yakin sama-sama kapal perang ini bahan bajanya beda, ini yang kami maksud Pak.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Nanti terkait lelang kalau memang perlu ditambahkan oleh Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan silakan.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (RONALD SILABAN):

Terima kasih atas izin Pimpinan Pak Menhan, Pak KASAL. Jadi kami menjelaskan bahwa mungkin data yang didapat adalah data nilai analisa. Jadi nanti begitu persetujuan diberikan, maka proses dimulai dan untuk itu akan dilakukan penilaian ulang Bapak, dan kita akan menggunakan penilai, dan nanti nilainya itu akan terbuka dan kemudian bahkan ketika dilelang pun itu lelang adalah merupakan suatu sistem di mana kita melakukan secara terbuka. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjaga kekhawatiran yang Bapak sampaikan. Jadi akan dilakukan penilaian ulang bersamaan Pak.

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik silakan Pak Menhan diteruskan.

MENTERI PERTAHANAN RI (LETNAN JENDERAL TNI (PURN.) H. PRABOWO SUBIANTO):

Kemudian saya juga menanggapi beberapa komentar yang sebenarnya mendukung pembangunan kekuatan TNI yang tangguh dan yang dapat melaksanakan tugas utama yaitu melindungi segenap tumpah darah kita. Jadi saya pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang luar biasa dari semua fraksi Komisi I terutama yang sangat mendukung pembangunan kekuatan TNI. Kami merasa benar-benar dukungan politik yang sangat luar biasa.

Kemudian kami juga ingin menyampaikan di sini suatu kenyataan bahwa Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran yang terbesar mungkin dalam 40 tahun bahkan mungkin sepanjang sejarah Republik Indonesia kalau dikaji dengan teliti.

Kemudian kami juga harus melaporkan di sini bahwa Menteri Keuangan dan teman-teman dari Kementerian Keuangan juga telah membantu dan telah mendukung rencana pembangunan kekuatan ini. Jadi memang kita kita harus akui bahwa Menteri Keuangan kita sangat *prudent*, sangat hati-hati, jadi memang kadang-kadang perjuangan sama keuangan cukup alot. Tapi saya kira itu tugas mereka, kalau mereka tidak alot ya mungkin manajemen keuangan kita tidak seperti sekarang. Tapi saya laporkan di sini *alhamdulillah* baru beberapa hari ini kami dapat lampu hijau bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh dan konsen

Bapak-bapak sekalian *insya allah* dalam waktu yang bisa kelihatan bahwa TNI akan menjadi sangat kuat di Asia Tenggara. Angkatan laut kita akan kembali jaya di samudra.

Saya telah laporkan ke Presiden Kabinet bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur. Jadi ini termasuk, terutama adalah *river basement* kapal-kapal yang ada jadi memang banyak yang sekarang sudah susah, tidak bisa diperbaiki ya kita laporkan apa adanya. Daripada kita pelihara yang tidak bisa kita rawat, tapi yang bisa dirawat akan kita operasionalkan, dan saya kira ini juga dukungan dari Komisi I yang sangat kuat dan Kementerian Keuangan yang juga mendukung. Jadi saya kira konsen Komisi I, kita sudah kerja yang maksimal saya kira dalam waktu beberapa bulan ke depan, saya kira kita akan merasa lebih bangga memiliki TNI yang tangguh dan Angkatan Laut kita jaya kembali di lautan kita.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Terima kasih Bapak Prabowo Subianto melegakan mudah-mudahan bisa tercapai, dan mudah-mudahan juga dengan hadirnya Kementerian Keuangan di sini tadi ada Bu Menkeu sekarang Pak Dirjen kebatinan yang kita rasakan juga bisa dirasakan oleh teman-teman Kementerian Keuangan dan ditindaklanjuti sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Pertahanan.

Silakan selanjutnya Saudara KASAL.

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT (LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M.):

Terima kasih Ibu Ketua menanggapi tadi pertanyaan Bapak Anton dan Pak Sturman tentang penggantinya, jadi yang kami maksud 9 tadi memang LST atau jenis angkut tank atau *landing ship tank* yang seperti kapal ini Pak yang KRI Sampit dan Mandar ini ada 9.

Jadi karena umurnya kapal ini sudah 40 tahun sehingga sejak tahun 2012 itu sudah disiapkan penggantinya 9. Nah, saat ini 9 tersebut tinggal dua yang belum jadi di PT. DRU Lampung jadi 9 ini sudah jadi penggantinya ada. Namun dari 9 yang lama tadi, baru 5 yang di ajukan untuk *push*. Nah, yang 4 ini masih masuk dalam *river basement* sehingga malah jumlahnya bertambah Pak dengan ada yang baru.

Jadi melaporkan bahwa ini sudah ada penggantinya. Tapi kalau tadi disampaikan kurang banyak, iya memang Pak, karena konsep perang kita masih menggunakan konsep perang operasi gabungan TNI, operasi amfibi, maupun operasi pendaratan administrasi. Jadi kalau menggunakan batalion tim pendarat yang satu barikade, membutuhkan 16 LST atau AT sehingga memang butuh banyak, karena masih strategi atau masih konsep kita masih menggunakan konsep perang itu operasi gabungan TNI.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Baik terima kasih Jika dirasa cukup Bapak Ibu Pimpinan maupun Anggota Komisi I yang terhormat, kita melihat rancangan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI itu tolong

dikoreksi, DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Kepala Staf Angkatan Laut Kamis, 27 Januari 2022 dengan petikan atau bunyi sebagai berikut.

Terima kasih Pak Tamliha dari Fraksi PPP intinya setuju Pak ya kita sudah bicara jadi sudah bisa masuk langsung ke kesimpulan.

Setelah mendengarkan penjelasan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Kepala Staf Angkatan Laut, Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan Kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan Surat Presiden RI Nomor 52/PRES/10/2021 perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara "I"-nya kebanyakan tolong dihapus, berupa Kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan kapal KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan dan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Baik Bapak, Ibu sekalian.

Seperti ini petikannya cukup? Silakan Pak Saudara Menhan juga dilihat.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Bu.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Silakan Pak Sturman.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ya yang mungkin disampaikan tadi untuk penggantinya boleh dimasukkan nggak? Nggak apa-apa kan ini kan sebagai apa mendorong nggak boleh?

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Bukan nggak boleh, karena suratnya surat persetujuan untuk menjawab surat Presiden kita bisa tambahkan nanti di rapat dengan Kementerian Pertahanan. Ini, cukup ya Bapak, Ibu sekalian?

Baik, kami sekali lagi bacakan kesimpulannya, setelah mendengarkan menjelaskan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Kepala Staf Angkatan Laut Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan Sesuai dengan surat Presiden RI Nomor R sekian-sekian perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan kapal Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya ketok ya?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, dengan demikian kita ucapan syukur *alhamdulillah* satu tugas kita yang telah diamanahkan oleh Badan Musyawarah DPR untuk kemudian memberikan jawaban atas surat

oresiden telah kita lakukan. Pak Saudara Menhan kemudian Pak KASAL dan yang mewakili Menteri Keuangan ini nanti akan segera kami bersurat internal ke DPR untuk dapat segera dibawakan kepada Paripurna persetujuannya.

Terima kasih rapat persetujuan kita tutup sekali lagi dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan *alhamdulillah rabbil'amin* rapat kami tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.07 WIB)
(KETUK PALU: 3X)**

**Jakarta, 27 Januari 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sartomo, S.S., M.Si
NIP. 19680811 199603 1 001**